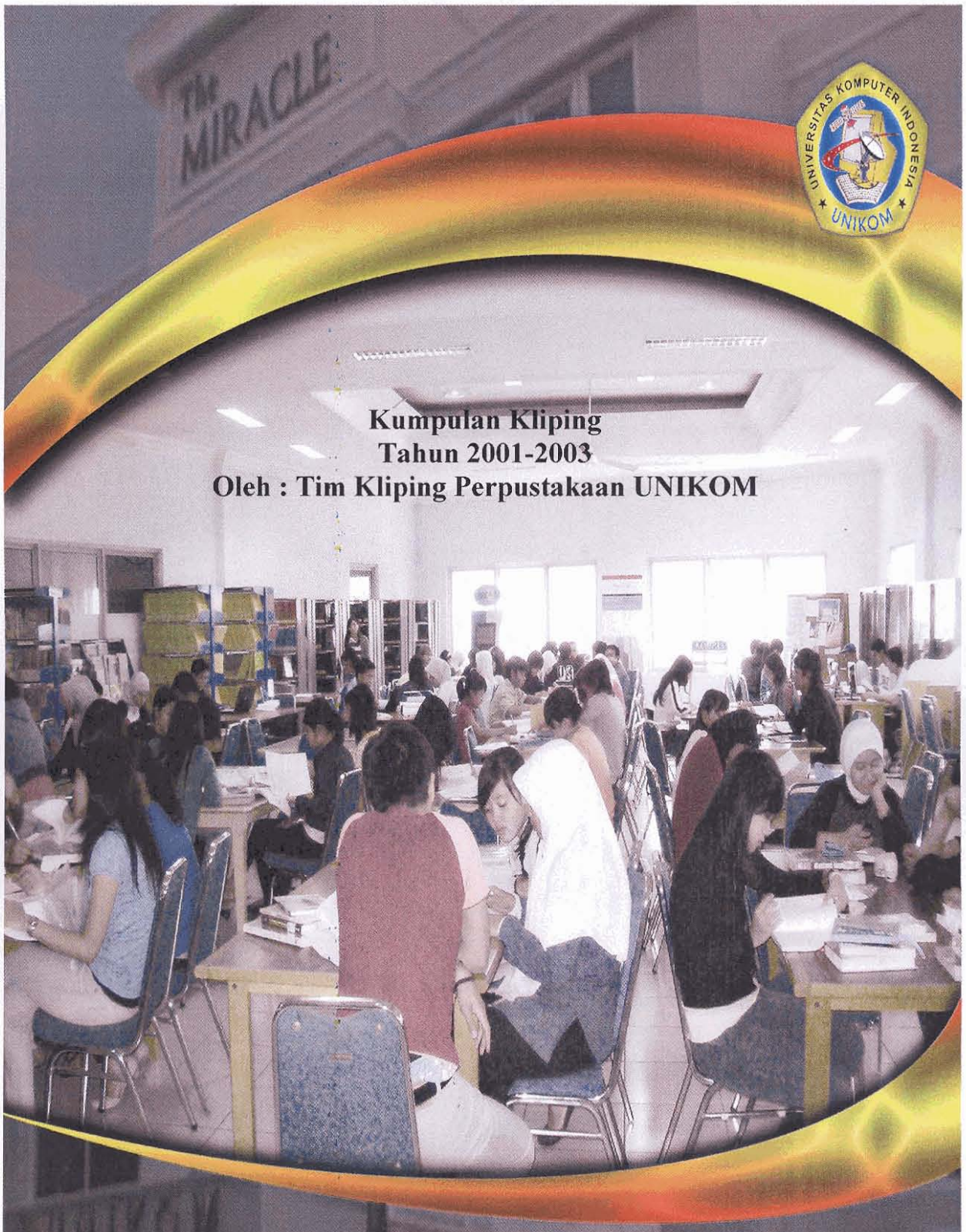


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 22 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 1 DAN 11 / 7-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 629.44 / STASIUN ANTARIKSA

Mir? Aman, tetapi Mendebarkan Juga

SEBELUM mencebur ke Samudera Pasifik, pada kawasan luas antara Selandia Baru dan Cile, pada hari Jumat besok, stasiun ruang angkasa Rusia, Mir, akan melewati Jepang dan Australia. Pihak Rusia mengatakan, proses penghancuran Mir akan berlangsung aman. Ahli ruang angkasa Rusia yang ikut dalam tim pengamatan ilmiah dan membangun tenda di Fiji mengatakan, kecil peluang bahwa jatuhnya Mir menimbulkan masalah.

"Mutlak tidak berbahaya," ujar Sergey Zaletin, komandan kosmonot pada misi berawak terakhir ke Mir seperti dikutip *Reuters*.

Namun, tak urung proses ini menimbulkan kekhawatiran juga, khususnya bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Warga di negara-negara kecil di kawasan ini khawatir, pecahan Mir seukuran mobil masih ada yang selamat dari gesekan atmosfer dan nyasar ke mereka.

Alasan khawatir juga ada karena pecahan yang lolos tersebut—dari sekitar 1.500 pecahan Mir, dengan bobot total sekitar 140 ton—akan melesat dengan kecepatan tinggi. Seperti diuraikan dalam tulisan *Mir, Setelah Kebanggaan Jadi Kenangan* pada halaman 25 di harian ini, kalaupun menumbuk beton keras, pecahan tersebut masih bisa menghunjam sedalam dua meter.

Atas dasar itulah, yang berwenang di Fiji, negara di Pasifik berpenduduk 800.000 jiwa, melarang warganya keluar setelah Kamis malam. Penduduk juga diminta keluar dari kapal dan jangan menyentuh "benda asing".

Jepang juga sudah mengeluarkan peringatan serupa, sementara pihak berwenang di Australia dan Selandia Baru bersiaga menghadapi keadaan darurat apa pun. Selandia Baru juga berupaya memberi tahu kapal-kapal nelayan Amerika yang beroperasi di perairan dekat wilayahnya yang mungkin dilalui oleh reruntuhan Mir.

Meski menyatakan prosedur untuk Mir aman, Rusia tak mau ambil risiko. Itu sebabnya, mereka mengambil asuransi senilai 200 juta dollar AS untuk berjaga-jaga bila rencana menceburkan Mir ke wilayah tak berpenduduk melenceng.

Pihak lain yang menempuh langkah persiapan adalah perusahaan penerbangan. Maskapai penerbangan Australia, Qantas, menyatakan punya satu penerbangan yang mungkin bisa kena pengaruh urusan Mir ini, yakni penerbangan Jumat pagi dari Sydney ke Buenos Aires.

◆◆◆

KENYATAANNYA, menurunkan benda seberat 140 ton dari luar angkasa memang bukan proses sederhana. Orbitnya diturunkan secara bertahap. Tanggal 18 Maret, ketinggian orbit rata-rata 230,9 km, pada tanggal 21-22 Maret ketinggian sudah turun jadi 220 km.

Begitu pihak berwenang Rusia memutuskan bahwa tanggal 23 Maret merupakan hari terakhir Mir berada di angkasa, maka dalam kurun 24 jam pada tanggal itu, para teknisi akan menyalakan jet sebanyak tiga kali untuk mengerem Mir dan mengarahkannya menuju zona pendaratan. Hal ini dilaksanakan dengan mempertumbangkan aktivitas Matahari, yang merupakan kekuatan pengereman utama di ruang angkasa.

Keseluruhan proses akan berlangsung dalam empat orbit. Dengan penyalaan jet, setelah dua orbit pertama, stasiun akan merosot ketinggian orbitnya, menjadi 170-180 km. Mir masih akan membuat satu kali orbit tanpa perubahan. Lalu pada puncak orbit keempat, jet akan dinyalakan terakhir kali untuk mengerem stasiun yang jatuh tersebut, dan selanjutnya Mir akan merosot secara tidak terkontrol.

Dua per tiga stasiun dipercayakan terbakar saat memasuki atmosfer dengan laju satu kilometer per detik. Bagian yang selamat dari gesekan atmosfer akan terserak di kawasan seluas 5.000 sampai 6.000 km (panjang) dan 200 km (lebar).

◆◆◆

SETELAH Mir terkubur di dasar Samudera Pasifik, orang masih memendam berbagai isu, tidak saja mengenai masa depan program ruang angkasa Rusia, tetapi juga tentang pengaturan membuang limbah angkasa, baik di ruang angkasa sendiri maupun di Bumi.

Dengan Mir saja, Forum Pasifik Selatan yang beranggotakan 16 negara sudah menyatakan akan menyampaikan keluhan bahwa negara besar telah menggunakan Samudera Pasifik sebagai kuburan bagi limbah angkasa.

Sementara dari sebuah konferensi di Jerman muncul pandangan bahwa ruang angkasa yang di satu pihak disebut sebagai "perbatasan terakhir", ternyata kini telah menjadi kawasan pembuangan limbah. Ribuan peluncuran roket yang dilakukan sejak fajar abad ruang angkasa tahun 1957 telah menyisakan kepingan yang mengorbit, yang bisa menjadi penghambat bagi peluncuran di masa datang.

Sekadar catatan, sekarang ini terdapat 8.500 obyek buatan manusia yang mengelilingi Bumi, dan dari jumlah itu hanya sekitar 600 yang merupakan satelit atau wahana antariksa yang masih berfungsi. Bahkan, kalau yang dihitung juga termasuk pecahan logam dan reruntukan wahana antariksa, maka jumlah sampah yang mengorbit bisa antara 100.000 dan 150.000.

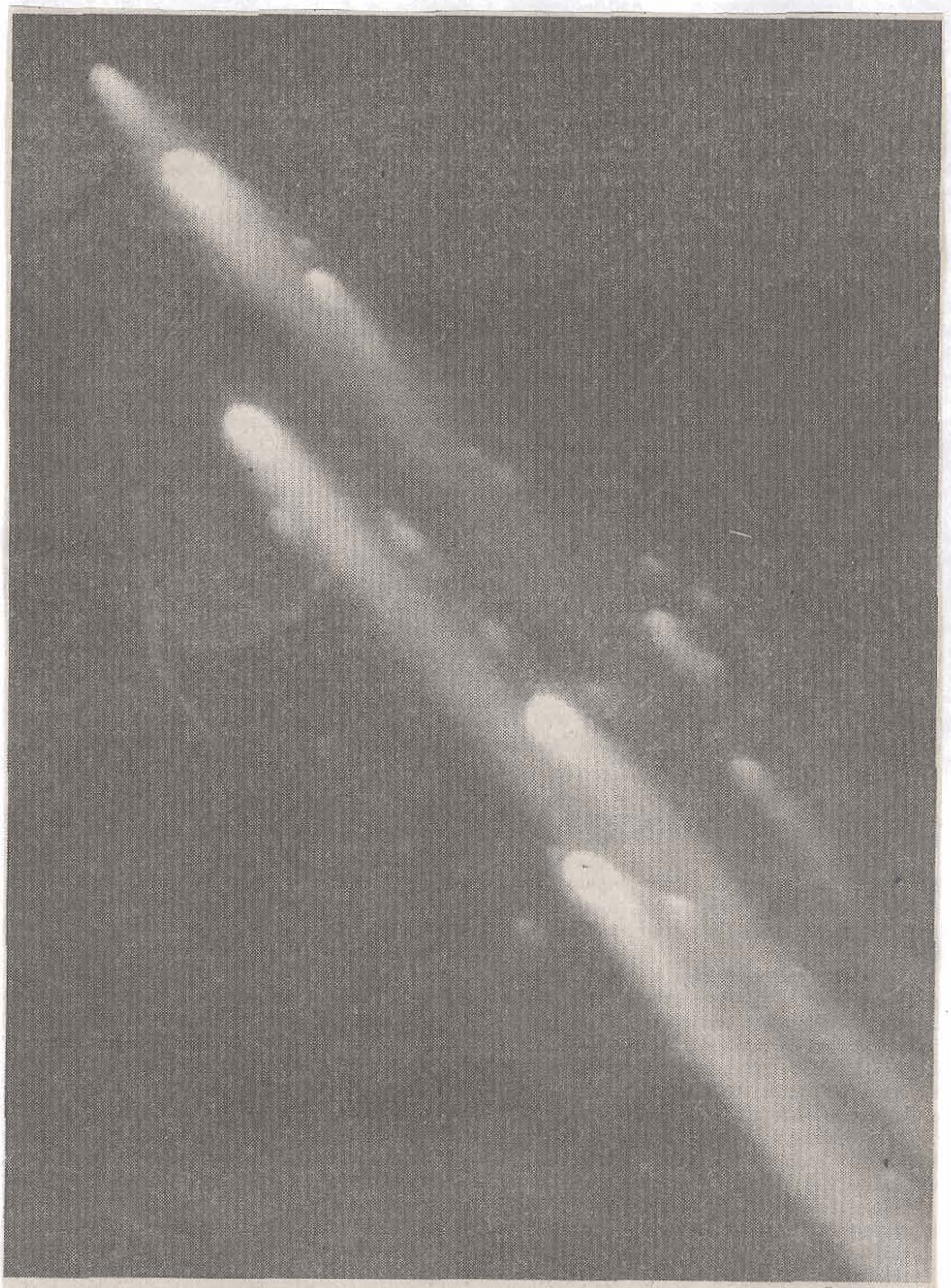
Penurunan kembali Mir setelah diakhiri masa baktinya bisa dikatakan sebagai upaya untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan antariksa, sebagaimana dilakukan AS dengan menurunkan Skylab-nya di akhir tahun 1970-an.

Tak semua bisa mendapat kesempatan menyaksikan saat-saat terakhir Mir sebagaimana tim Rusia yang berada di Fiji. Akan tetapi, hasil kerja tim tersebut dalam beberapa jam kemudian, pada era Internet sekarang ini, dapat dibaca di situs Internet www.mirreentry.com. **(nin)**

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 24 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 1 DAN 11 / 5-8 DAN 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 620.44 / STASIUN ANTARIKSA

Mir Jatuh Mulus di Pasifik



Reuters/mark baker

MENUJU SAMUDERA — *Serpihan-serpihan stasiun ruang angkasa Rusia Mir bagai bola-bola api berkejaran di angkasa di atas Fiji dalam perjalanannya menuju peristirahatan terakhirnya di Samudera Pasifik, memberi pertunjukan spektakuler hari Jumat (23/3). Mir jatuh ke Bumi dan hancur berkeping-keping setelah Pusat Pengawas Misi Rusia menyalakan jet untuk mendorongnya keluar orbit, 15 tahun setelah stasiun ruang angkasa itu diluncurkan.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

Korolyov, Jumat

Stasiun ruang angkasa Mir yang pernah menjadi lambang kebanggaan keberhasilan Soviet di ruang angkasa, Jumat (23/3), jatuh di Samudera Pasifik dengan mulus. Dengan demikian, selesailah keberhasilan misi 15 tahun dari wahana ruang angkasa milik Rusia itu.

Kepingan-kepingannya yang menyala bergemuruh melintas di atas Fiji dalam sebuah pertunjukan kembang api yang cemerlang sebelum tercebur ke Samudera Pasifik di antara Selandia Baru dan Cile.

Di bagian dunia yang lain, di Korolyov (Rusia), para pengawas misi Rusia saling berjabatan tangan dan mengucapkan selamat atas keberhasilan menjatuhkan stasiun angkasa yang pernah menjadi kebanggaan program ruang angkasa mereka itu. Para pejabat Rusia dan Australia mengatakan, jatuhnya Mir yang telah berumur itu berlangsung sempurna, tercebur di dalam kawasan sasaran ratusan kilometer dari daratan mana pun.

Walaupun ada wajah-wajah sedih di antara petugas Rusia itu, ada juga kebanggaan dalam keberhasilan Rusia mempertahankan Mir di ruang angkasa jauh lebih lama dibanding yang direncanakan, serta senyum lega bahwa semua berlangsung sesuai jadwal.

"Mir telah menyelesaikan misi gemilangnya," demikian diumumkan di pusat misi di luar Kota Moskwa. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah riset ruang angkasa."

Para saksi mata melaporkan, melihat hujan titik-titik warna kekuningan menyala jatuh dari langit bagaikan adegan dalam sebuah film fiksi ilmiah.

Lima atau enam kepingan dari stasiun yang hancur kala memasuki atmosfer Bumi itu berkelebat menyala di atas pohon-pohon palem dan pantai-pantai Fiji bagaikan bola-bola api warna putih dengan sekumpulan kepingan-kepingan yang lebih kecil di belakang mereka. Kepingan-kepingan menyala itu menerangi langit senja selama hampir delapan detik, kemudian empat dentuman sonik yang gemuruh mengguncang pulau itu sekitar tiga menit kemudian.

"Sepertinya seseorang menyorotkan senter ke mata Anda. Ini sangat hebat," kata fotografer *AP* Rob Griffith, yang menyaksikan sisa-sisa Mir berderam di atasnya. Fotografer *Reuters* Mark Baker yang sama terkesannya mengatakan, "Ini pengalaman sekali dalam hidup."

Penduduk menonton dengan terpesona. Orang-orang dewasa dan anak-anak berlarian sepanjang pantai, mencoba terus melihat kembang api kosmik itu.

Para pejabat Australia dan Selandia Baru yang memantau jatuhnya stasiun ruang angkasa itu mengatakan, mereka yakin Mir—yang dalam bahasa Rusia berarti "perdamaian" dan "dunia"—jatuh di bagian Samudera Pasifik yang tak berpenghuni sekitar 3.000 km baratdaya Kepulauan Pitcairn milik Inggris.

"(Jatuhnya) ini terjadi tepat di area yang telah diramalkan badan ruang angkasa Rusia, antara Australia dan Cile," kata Direktur Emergency Management Australia David Templeman. "Saya lega."

Negara-negara di sekitar tempat jatuhnya Mir itu—Australia, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru—juga melepas napas lega, seperti halnya Jepang yang dilewati Mir saat jatuh.

Dengan menghadapi risiko terkena serpihan yang jatuh dengan kecepatan tinggi itu, sejumlah 27 kapal pukat tuna—yang sebagian besar milik orang AS—beroperasi di zona sasaran pada waktu Mir jatuh. Mereka lolos dari hujan serpihan itu.

Mir dipersiapkan menuju zona jatuhnya sekitar pukul 05.00 GMT (pukul 12.00 WIB), ketika Pusat Pengawas Misi di Korolyov, luar Kota Moskwa, menyalakan salah satu jetnya untuk mengerem orbit stasiun itu diikuti penyalaan jet kedua. Sebuah sinyal terakhir pada pukul 05.07 GMT (12.07 WIB) menyalakan jet selama dua puluh menit yang mengubah lintasan stasiun itu, melontarkannya ke zona jatuh yang telah ditentukan.

Sebagian besar dari wahana ruang angkasa raksasa itu—dengan ukuran 33 meter x 30 meter x 27 meter dan berbobot 137 ton—terbakar habis kala memasuki lapisan-lapisan atmosfer bumi.

Namun, diperkirakan sekitar 1.500 serpihan dengan berat total 20-30 ton, melanjutkan jatuhnya yang menyala menuju Samudera Pasifik.

Siaran televisi Rusia yang menayangkan menit-menit terakhir sebelum serpihan-serpihan itu tercebur ke laut memperlihatkan, lima atau enam serpihan besar tampak jelas oleh mata melintas cepat di angkasa.

Pukul 05.59 GMT, Mir telah tiada, demikian diumumkan para pejabat ruang angkasa Rusia di pusat pengawasan misi dengan khidmat.

Dalam ruang pengawasan misi—yang dipenuhi puluhan pemrogram di depan layar monitor komputer—suasana menjadi sunyi ketika kematian Mir diumumkan.

Ketika ketegangan menurun setelah semalaman, beberapa dari para petugas kontrol itu meneteskan air mata atas hancurnya Mir, sebuah lambang peran perintisan Uni Soviet di ruang angkasa yang selama lima dekade bersaing sengit dengan AS.

"Mir membuktikan Rusia tidak hanya membuat benda-benda, tetapi juga bisa mengoperasikannya," kata Koptev pada wartawan. "Rusia adalah dan akan tetap menjadi sebuah kekuatan ruang angkasa."

Sejarah stasiun Mir dimulai tahun 1981 ketika Uni Soviet memutuskan untuk mengganti kapsul ruang angkasa yang tidak nyaman yang sebelumnya dikirim ke ruang angkasa, guna memberi para kosmonot kesempatan untuk melakukan lebih banyak percobaan ilmiah dalam waktu yang lebih lama.

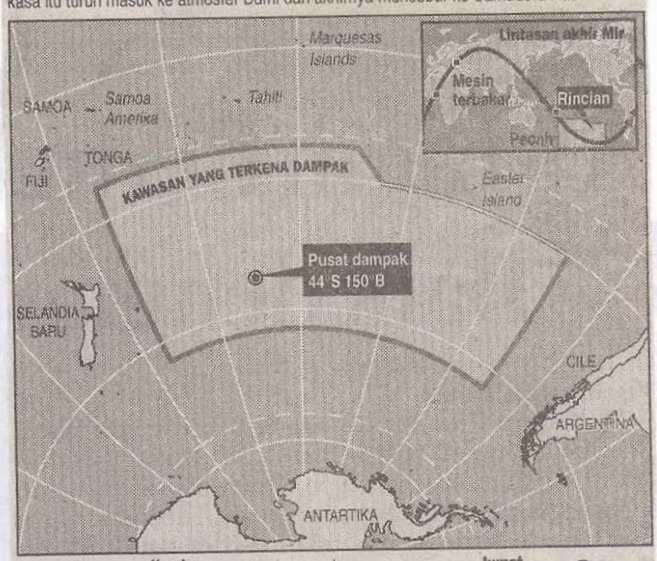
Bagian pertama stasiun ruang angkasa yang mengorbit itu diluncurkan pada 20 Februari 1986. Sejumlah 28 misi jangka panjang oleh 106 astronot—yang melakukan ribuan percobaan ilmiah di dalam Mir—memberi wawasan-wawasan baru mengenai asal mula jagat raya, fisika, dan teknologi.

(Reuters/AP/AFP/di)

Akhir Kejayaan Mir

Serpihan Stasiun Ruang Angkasa Jatuh di Pasifik

Setelah sukses menyejajarkan panel surya Mir dengan Matahari untuk mengisi baterai, Kontrol Misi Rusia beralih ke seri manuver berikutnya untuk menuntun stasiun ruang angkasa itu turun masuk ke atmosfer Bumi dan akhirnya mencebur ke Samudera Pasifik.



Kamis

19.30
Kendaraan kargo Progress menghidupkan mesin untuk menurunkan stasiun dan mengubah orbit.

21.00
Progress menghidupkan mesin untuk kedua kalinya dalam 20 menit.

Jumat

24.00
Mesin hidup selama 23 menit untuk mengirim stasiun ruang angkasa.

01.00
Pecahan tersebar masuk ke Pasifik Selatan.

Catatan: Seluruh waktu adalah EST (waktu di bagian timur AS)

Sumber: Federasi Ilmuwan Amerika, digabung dari laporan kantor berita AP

AP

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 11 / OKTOBER / 2002
Hlm/Kolom : 15 / 1-6
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 630 / PERTANIAN

Subsidi Gula Berupa Paket Program

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih menyatakan, subsidi gula akan diberikan kepada petani dalam bentuk paket program, yaitu penggantian bibit dan biaya membongkar tanah untuk mencabut tebu yang ada.

"Jadi (subsidi) tidak diberikan tunai seperti yang dituntut petani, yaitu Rp 500 per kilogram," kata Saragih usai mengikuti Sidang Kabinet di Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis (10/10).

Dijelaskan, bila subsidi diberikan tunai, yang menerima belum tentu petani. "Karena yang terdaftar di pabrik gula adalah yang memasukkan tebu ke pabrik. Padahal, pabrik gula tidak selalu menerima langsung dari petani, ada yang dari pedagang. Kalau kita beri Rp 500 per kilogram, itu artinya pedagang itu yang menerima," ujar Mentan.

Selain itu, sulit melakukan kontrol terhadap penyaluran subsidi yang diberikan secara tunai. "Mekanisme penyalurannya bagaimana. Kalau kita berikan tunai, belum tentu dimanfaatkan untuk mengganti bibit, dan membongkar tebu yang sudah tua. Akibatnya, produktivitas tidak naik, dan tahun depan minta lagi subsidi," tutur Saragih.

Pemberian subsidi melalui paket program penggantian bibit dan pembongkaran tebu yang sudah tua didasarkan pada kenyataan, bahwa selama ini produktivitas tebu rakyat rendah karena ratun yang digunakan rata-rata telah tua. "Bahkan, ada yang telah 15 kali dipakai, padahal seharusnya maksimal hanya dua kali. Itu sebabnya produktivitas kita rendah. Kita akan membantu petani mendapatkan bibit yang baru. Seiring dengan penggantian bibit, maka tebu yang sudah tua harus dibongkar, dan itu biayanya besar, karena seluruh lahan tebu di Jawa akan dibongkar," kata Mentan menjelaskan.

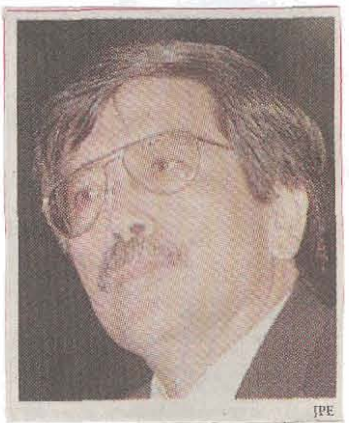
Untuk program tersebut, lanjut Saragih, pemerintah telah menyediakan anggaran Rp 50 milyar. "Itu yang sudah pasti, tetapi kita minta supaya itu diperbesar agar dapat mempercepat usaha kita mengubah bibit, dan membongkar tanah," katanya.

Bila program revitalisasi tanaman tebu berhasil, biaya produksi gula nasional per kilogram sebesar Rp 2.000. Saat ini biaya produksi Rp 3.100 per kilogram, padahal di negara lain hanya Rp 2.500 per kilogram. "Kalau nanti biaya produksi kita Rp 2.000 per kilogram, orang akan berpikir ulang untuk impor gula," ujar Mentan.

Untuk mencegah membanjirnya impor gula, menurut dia, tidak bisa hanya dengan mengeluarkan larangan impor. Tetapi, harus diimbangi dengan meningkatkan daya saing gula nasional, yaitu dengan meningkatkan produksi dan produktivitas. "Untuk jangka pendek, yaitu dua tahun, kita memang bisa gunakan larangan impor. Untuk jangka panjang kita tidak bisa hanya dengan melarang, tetapi harus dengan meningkatkan produktivitas dan produksi," demikian Saragih menegaskan.

Pahami

Di tempat terpisah, Direktur Tanaman Semusim Departemen Pertanian Hasanuddin Ibrahim menyatakan, "Kami meminta agar petani memahami ini karena sistem penganggaran kita tidak memungkinkan pemberian subsidi secara langsung," kata Ibrahim. Ia menyebutkan, subsidi program itu merupakan salah satu dari empat usulan yang muncul yaitu subsidi tunai, dana talangan (*standing loan*), dan pemberian modal bagi perusahaan yang didirikan petani tebu.



Bungaran Saragih

JPE

Ibrahim mengatakan, subsidi program yang akan dilakukan antara lain penyediaan bibit yang bermutu tinggi, dana talangan untuk pembongkaran keprasan yang sudah berusia tua, perbaikan irigasi, dan peningkatan mutu penelitian dan pengembangan.

Paket program itu akan dilaksanakan selama tiga tahun yang mencakup areal 127.000 hektar yang tiap tahunnya akan dilakukan perbaikan sebanyak 71.000 hektar. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 350 milyar. Selama tiga tahun itu diharapkan dari lahan yang ada sudah terbentuk siklus 30 persen adalah *plant cane*, 30 persen berupa keprasan satu, dan 40 persen berupa keprasan dua.

Ibrahim mengatakan, pilihan untuk memperbaiki kebun karena dari riset yang dilakukan menunjukkan peningkatan produksi gula bisa dilakukan bila ada upaya perbaikan kebun tebu terlebih dulu. Peningkatan efisiensi teknis pabrik gula juga harus dilakukan namun pilihan ini terkendala oleh biaya yang lebih besar.

Protes

Menyikapi subsidi dalam bentuk program itu, pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....

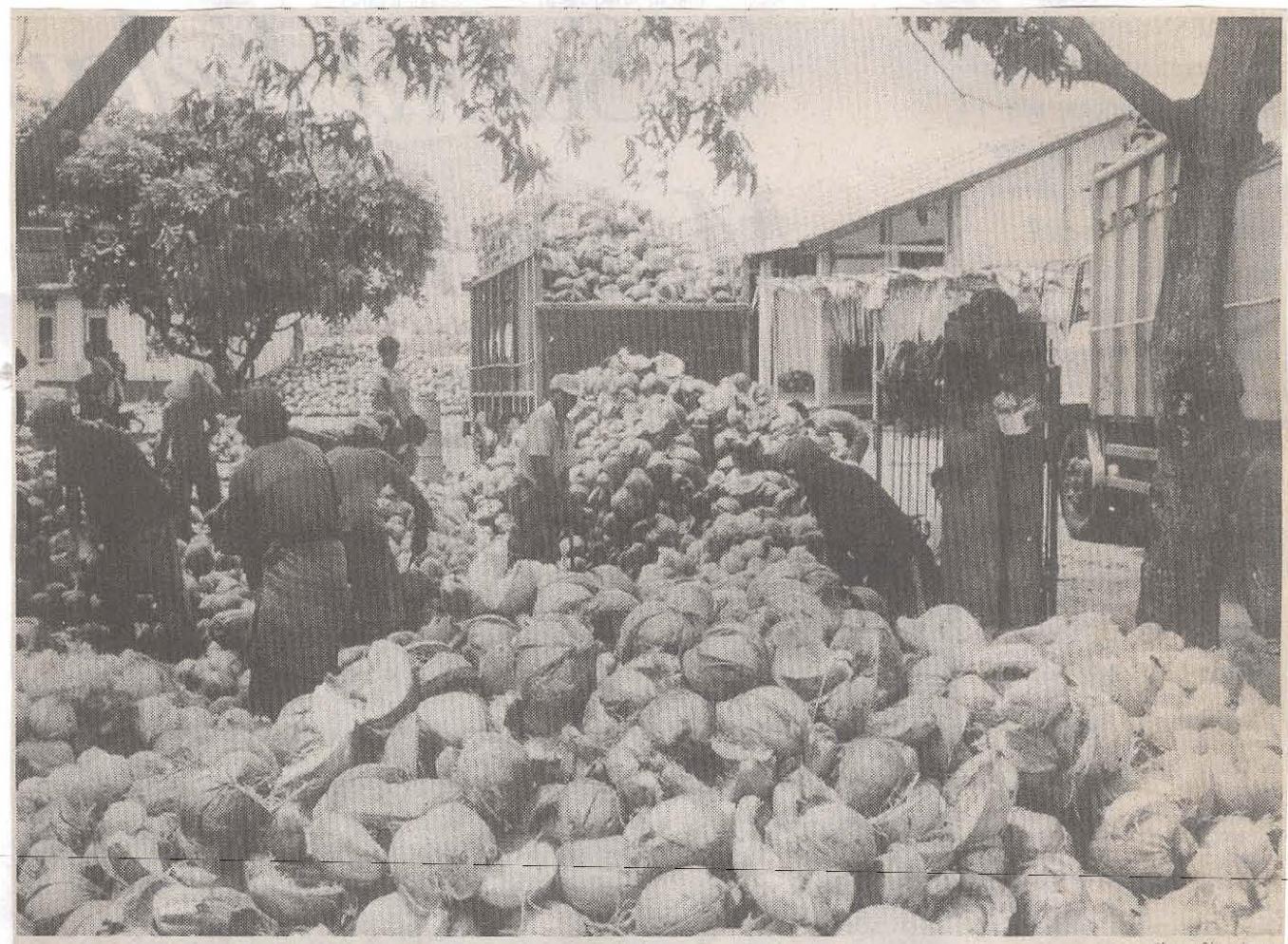
(Jabar) di Cirebon kemarin, menilai tindakan itu mencerminkan tidak adanya rasa empati terhadap penderitaan rakyat kecil, terutama para petani tebu yang sedang terpuruk nasibnya.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) APTRI Sindanglaut, Kabupaten Cirebon, Jabar Anwar Asmali mengatakan, pernyataan Mentan itu menunjukkan ketidakkonsistenan sikap pemerintah dan kacaunya koordinasi di tingkat pemerintah pusat terutama antara menteri-menteri dalam Kabinet Gotong Royong dengan Presiden Megawati Sukarnoputri. "Kalau memang sudah tidak bisa lagi mengurusi pertanian, lebih baik segera keluar saja dari kabinet," ujar Anwar dengan nada emosional.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) APTRI Jabar H Amin Abdullah menegaskan, pembatalan pemberian subsidi itu sangat mengecewakan masyarakat petani tebu. Menurut dia, sejak Presiden Megawati menyatakan akan memberikan subsidi langsung kepada para petani tebu Rp 500/kg gula pasir yang diproduksi, para petani di seluruh Indonesia merasa lega dan sangat menunggu-nunggu bantuan itu segera cair. "Dengan subsidi langsung itu, para petani dapat membayar semua utangnya kepada bank maupun pihak lain, dan dapat memulai masa tanam untuk tahun 2003, sehingga tahun depan pabrik-pabrik gula di wilayah kami masih dapat hidup," papar Amin. (ELY/OSD/MBA/MAR/DHF)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 23 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 29 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran~~ Rakyat /
Penulis : ANWAR, khaerul.
No_Klass/Subjek : 633.5 / PERKEBUNAN KELAPA

Membangun Ekonomi Kerakyatan Lewat Kelapa



Kompas/khaerul anwar

TIDAK BERMANFAAT — *Sabut kelapa bisa digunakan untuk bahan baku jok mobil dan landasan pacu pesawat terbang. Namun, hasil ikutan buah nyiur ini justru lebih banyak jadi limbah. Di pusat produksi kelapa Desa Tanjung, Lombok Barat, sisa sabut kelapa yang menggunung diangkut untuk dibakar karena tidak bisa dimanfaatkan.*

KETIKA ditanya situasi pemasaran kelapa butiran dewasa ini, Haji Juaini (40) mengatakan, harga jual buah nyiur sekarang anjlok menjadi Rp 400 per butir. Bahkan hingga Rp 300 per butir bila membeli borongan langsung di kebun petani. Menurut bandar (pedagang pengumpul) kelapa warga Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pembantu Pemenang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini harga tertinggi terjadi pada awal krisis moneter (krismon) lalu.

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

"YANG paling enak pada awal krismon, harganya Rp 1.800 per butir. Makanya saya senang waktu krisis," ujar Juaini sambil *ngakak*.

Abdurrahman, bandar kelapa di Desa Tanjung, Lombok Barat, menyatakan, harga kelapa amat fluktuatif. "Hari ini dijual Rp 300, besok harganya jadi Rp 275, dan lusa malah Rp 400 sebutir," katanya, yang juga ketiban rezeki di awal krismon.

Saat itu nilai rupiah melemah, diikuti perusahaan besar kembang-kempis menghadapi krisis. Namun, sebaliknya industri kecil dan menengah tetap bertahan karena produknya berbahan baku lokal, dan banyak menyerap tenaga kerja.

"Saya *nyari* kelapa *sampe* Lombok Tengah dan Lombok Timur, saking banyaknya permintaan lokal maupun langganan di Jawa," ujar Juaini. Bahkan saat itu dia bisa membeli sebuah truk untuk mendistribusikan barang dagangannya.

Bila kini harga kelapa butiran melorot, seperti disebutkan tadi, Juaini masih bisa tersenyum, sebab permintaan lokal dan antarpulau nyaris tidak pernah sepi. Buruh pengupas maupun yang menaik-turunkan kelapa dari dan ke kendaraan pengangkut yang berjumlah 18 orang, bergairah menyambut pekerjaan.

Hanya dia masih waswas melihat gejolak politik dalam negeri yang belum juga stabil. Pasalnya, eforia reformasi yang ditunjukkan oleh maraknya unjuk rasa dan demonstrasi, mengimbas pada usaha perkelapaan. Pedagang pengumpul, buruh, dan sopir angkutan yang mengantarpulaukan komoditas itu dari Lombok ke Pulau Jawa, semua merasakan dampaknya.

Puncaknya adalah ketika terjadi demonstrasi pendukung Presiden Abdurrahman Wahid di Jawa Timur, yang tersulut oleh pertengkaran elite politik di Jakarta, menyebabkan 20.000 butir kelapa milik Juaini menginap dua malam di jalan seputar Banyuwangi. Kelapa yang diangkut dua truk Fuso itu terlambat diterima pemesan di Surabaya.

"Bagaimana kami mau lewat, pohon besar tumbang di jalan," ujar Azis, sopir truk yang mengangkut kelapa milik Juaini.

Akibatnya, Azis di-*complain* sebab kelapa banyak yang rusak ketika diterima pemesan. "Ini bukan kelapa Lombok, kok isinya banyak yang rusak. Wah, mutu kelapa Lombok jelek sekarang, dan macam-macam komentar saya dengar. Terus saya ceritakan duduk soalnya, walhasil pedagang pun maklum," tutur Azis.

Akan tetapi, keterlambatan sampai tujuan membuat kelebihan uang makan, yang mestinya menjadi jatah anak-istrinya, justru berkurang, karena dipakai makan-minum di perjalanan.

"Demo-demo terus, semua mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat. Apa tidak salah, saya kan rakyat juga. Bila sumber nafkah saya terganggu, siapa yang mau membela," tutur Azis.

◆◆◆

BAGI masyarakat Desa Tanjung dan sekitarnya, kelapa merupakan andalan dan sandaran hajat hidup buruh beserta keluarganya. Bila basis usaha ini terganggu oleh kepentingan politik, gaungnya langsung merembet pada pengusaha, petani pekebun beserta keluarganya. Mungkin, patutlah Azis yang notabene masyarakat akar rumput bertanya seperti itu.

Begitu pun Juaini yang kini mampu menyuplai kepentingan lokal dan luar daerah, di mana usaha itu diraih lewat perjalanan panjang setelah kurang cocok berjualan kacang tanah dan gabah.

"Walau harganya murah, tapi kalau mau cari kelapa kan kapan saja gampang didapat," kata Juaini mengutarakan pertimbangannya, mengapa memilih mata dagangan kelapa butiran (kelapa yang kulit luarnya dikupas).

Sebagaimana produk hasil bumi lain, kelapa pun diakui rentan terhadap fluktuasi harga. "Sekarang saya berani jual Rp 400 per butir, besoknya ada yang jual Rp 300, lusanya malah dipasarkan Rp 400 lagi," tutur Abdurrahman, bandar kelapa Desa Tanjung.

Pergerakan harga kelapa butiran bisa disiasati dengan membuat makanan tertentu sebagai "teman" makan nasi, ketimbang kopra misalnya. Bandar, sekaligus pembuat kopra ini, sekali tempo membikin bahan baku minyak goreng, kendati sebatas kepentingan lokal.

Hal ini disebabkan harga kopra, ditambah proses pembuatannya yang makan tempo, tidak menguntungkan dibanding harga kelapa jika dijual butiran. Untuk satu kuintal kopra memerlukan 400 butir kelapa, sedang harga kopra Rp 1.200 per kg.

Makanya, wajar saja apabila beberapa pengusaha pemilik pabrik pengolahan minyak di Mataram tidak bisa mengoperasikan pabrik secara optimal, akibat kekurangan kopra yang pasokannya merosot dari produsen. Ini sudah dirasakan sejak tahun 1993.

Menurut kajian Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) NTB, empat pabrik minyak goreng lokal di Mataram waktu itu membutuhkan 8.171,17 ton, sedang produksi kopra 14.581,32 ton. Itu berarti ada kelebihan produksi 6.000 ton lebih.

Pergerakan harga kelapa butiran bisa disiasati dengan membuat makanan tertentu sebagai "teman" makan nasi, ketimbang kopra misalnya. Bandar, sekaligus pembuat kopra ini, sekali tempo membikin bahan baku minyak goreng, kendati sebatas kepentingan lokal.

Padahal, kebutuhan minyak goreng di NTB tiap bulan 2.100 ton untuk konsumsi umum dan industri. Minyak goreng ini umumnya berupa produk luar daerah dan berbahan kelapa sawit, jagung, dan sejenisnya. "Ada empat pabrik pengolahan minyak goreng lokal, namun yang masih beroperasi satu pabrik, walau bahan bakunya (kelapa sawit) didatangkan dari luar," kata sumber *Kompas* di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian NTB.

Dilihat dari areal kelapa di Lombok Barat seluas 21.492 hektar dengan produksi 23.692 ton, atau rata-rata 1.200 kg per hektar, mestinya kelapa butiran untuk pasokan kopra bukan persoalan bila sekadar memenuhi keperluan pabrik.

Belum ada data konkret kebutuhan kopra bagi pabrik maupun untuk produksi minyak goreng tradisional sampai tahun 2001. Namun, secara ekonomis, memproduksi kopra kurang menguntungkan karena tiap satu kilogram kopra memerlukan empat kilogram kelapa, dan itu memerlukan waktu lebih panjang dan biaya proses produksi.

Perilaku konsumen yang lebih suka mengonsumsi minyak pabrikan berbahan baku kelapa sawit, jagung, dan kedelai, baik karena cita rasa maupun kemasannya memenuhi selera pembeli, adalah fakta konkret yang mendorong bandar berkonsentrasi pada usaha kelapa butiran.

Walau untung sedikit, tetapi ada pemasukan tiap hari. "Kan tinggal ambil di kebun, dikupas, naikkan ke truk untuk diangkut. Pangsa pasar, terutama di Pulau Jawa, bukan soal. Jangankan permintaan lokal, malah satu kampung kelapa dikirim saban hari, konsumen di Jawa masih kekurangan," kata Umar Sewet, ayah Abdurrahman.

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

Kelapa asal Lombok bisa menembus pasar luar daerah, disebabkan adanya kekhasan komoditas itu. Menurut Azis, daging buah kelapa lokal Lombok lebih tebal ketimbang kelapa sejenis produk daerah lain, dan lebih banyak kandungan minyaknya. "Itu sebabnya pengusaha di Jawa terus minta dikirimi," ujar Abdurrahman yang mengaku mengalami tantangan menembus pasar di Pulau Jawa.

Bandar muda ini kemudian meriwayatkan bagaimana berjibaku, menjual kelapa kupasan ke Surabaya yang dirintisnya tahun 1995-an. Di sana dia mengetahui seluk-beluk pasar. Dari pedagang penampung sampai sopir ikut 'bermain'.

Dikatakan, kelapa itu dibawa ke seorang penampung, lalu didistribusikan ke pengecer. Abdurrahman dibuat tidak berdaya, dagangannya diatur sedemikian rupa agar tidak laku, dan terpaksa melepas dengan harga miring. Di pihak lain, dia memasang telepon dan membagi-bagikan kartu nama kepada penampung yang kelak dijadikan mitra usahanya.

Hasilnya kini, dengan komunikasi yang baik, Abdurrahman bersama ayahnya, Umar Sewet, rutin mengirim kelapa ke Jatim (Bojonegoro, Madiun, Ngawi, Magetan) dan Semarang (Jateng). Sejak itu muncul pengusaha lokal mengantarpulaukan kelapa.

◆◆◆

BISA disebut Desa Tanjung dan Desa Pemenang merupakan pemasok utama kelapa bagi daerah perkotaan. Sedang desa lain lebih berperan sebagai produsen. Posisi ini membuat dua desa itu mampu mempengaruhi harga pasaran kelapa, yang terindikasi pada Februari lalu saat cuaca angin siklon melanda beberapa daerah di Lombok Barat.

Ketika itu harga kelapa naik dari Rp 550 menjadi Rp 700-Rp 800 per butir. Malah awal Maret di pasar daerah pinggiran Mataram harga kelapa Rp 1.000 per butir. Kenaikan harga ini disebabkan kelapa asal Kecamatan Bayan, Gangga, dan Tanjung absen di pasar. Tukang panjat tidak berani memetik buah kelapa di pohon saat musim pancaroba itu.

Harga jual itu berarti dua-tiga kali dari harga pembelian bandar di tingkat petani pekebun senilai Rp 300 per butir. Ini pun belum ditambah ongkos muat ke truk senilai Rp 5 per butir per orang, yang ditanggung oleh bandar.

Dari total biaya, bandar mengakui keuntungannya sedikit. "Dapat Rp 25-Rp 50 per butir dari total penjualan 10.000 butir, sangat besar buat kami di desa," ungkap Umar Sewet.

Sedang Juaini menegaskan, meski untungnya kecil, namun dia merasa puas bisa membantu rakyat miskin yang sulit mendapatkan sumber penghasilan demi menyambung hidup tiap hari.

"Saya panggil pukul 11.00 malam untuk mengupas, mereka pasti datang. Kadang saya tidak bisa menahan *ngantuk* menunggu mereka selesai mengupas. Ya, inilah cara saya membantu tetangga yang kesulitan," ucap Juaini.

Bantuan bandar tampaknya amat berharga, kendati standar upah yang didapat pekerja relatif murah. Pengupas memperoleh Rp 15-Rp 20 per butir, sedang buruh muat Rp 10-Rp 15 per butir. Pekerjaan ini biasanya dilaksanakan secara borongan.

Dari 23 bandar di Desa Tanjung dan Pemenang, kelapa yang dikirim ke luar daerah sebanyak dua-tiga truk Fuso, atau 20.000-30.000 butir per hari.

Berapa sumbangan kelapa pada devisa daerah belum ada data rinci. Namun, penyerapan tenaga kerja dan dampak sosial ekonominya sangat besar artinya buat penduduk. Bahkan di Desa Pemenang, Desa Tanjung, dan sekitarnya, kelapa menjadi roda penggerak perekonomian rakyat pedesaan, jauh sebelum ekonomi kerakyatan digembar-gemborkan orang.

◆◆◆

KELAPA tampaknya memiliki prospek cerah di masa datang, sebab pangsa pasarnya sudah jelas dan diperlukan sepanjang tahun. Di Lombok Barat, luas areal tanaman kelapa 21.100 hektar, menempati urutan pertama dari sembilan tanaman tahunan di kabupaten itu, disusul jambu mete (20.023 hektar), kakao (2.395 hektar), dan kopi (1.926 hektar).

Dari total areal kelapa itu, ada 2.471 hektar belum menghasilkan, dan yang tidak menghasilkan (tua/rusak) 314 hektar. Dinas Perkebunan Lombok Barat mengupayakan penanaman baru. Hanya saja, kata sejumlah bandar, bibit kelapa yang ditanam mutunya jelek, dan bukan mustahil melahirkan keturunan berkualitas rendah.

Hal itu, betapapun jadi kendala dan tantangan, produktivitas kelapa di Lombok rata-rata 1.288 kg per hektar, tidak beda jauh dengan produksi Sulawesi Utara sekitar satu ton per hektar, meski lebih rendah ketimbang produksi Filipina dua ton per hektar.

Banyak pula petani menjual janur yang harganya sangat menjanjikan, yakni Rp 150-Rp 200 per lembar, telah ikut pula mengancam produktivitas kelapa per pohon.

Tantangan itu mengisyaratkan perlunya peningkatan efisiensi pengelolaan budi daya tanaman, dan penganekaragaman produk kelapa, seperti *coconut cream, desiccated coconut*, dan lain-lain. Limbah kelapa jika diolah bisa menghasilkan uang, seperti tempurung untuk arang, sabut untuk bahan baku kerajinan. Dengan sentuhan teknologi, produk ikutan kelapa itu justru lebih mahal ketimbang *mentahan*-nya. **(Khaerul Anwar)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 26 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 15 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : Puslitbang Sosek Pertanian Bogor
Subjek / NO. CLASS : PRODUKSI PADI / 633.1

Cerita di Balik Angka Produksi Padi 2002

Sudi Mardianto dan **Nizwar Syafa'at**

◆

PRODUKSI padi tahun 2002 berdasarkan angka ramalan (aram) II Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan meningkat sebesar 0,75 persen dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu dari 50,46 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 50,84 juta ton GKG. Perkiraan peningkatan produksi padi tahun 2002 jelas melegakan bagi pemerintah. Sebab, banyak kalangan memprediksikan akibat banjir yang terjadi pada awal tahun ini produksi padi di Pulau Jawa pada tahun 2002 akan lebih buruk dari tahun 2001. Prediksi itu kemudian menimbulkan polemik yang berkepanjangan bahwa impor beras tahun 2002 bisa mencapai tiga juta ton. Polemik ini pun akhirnya mengarah pada tindakan spekulasi pasar dan instabilitas nasional.

NAMUN, apabila diperhatikan lebih saksama, peningkatan produksi padi tahun ini lebih disebabkan oleh meningkatnya produktivitas serta luas panen nasional yang juga meningkat sebesar 0,59 persen. Namun, peningkatan luas panen tersebut sebagian besar terjadi di luar Jawa, sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur, Pulau Sumatera, dan Kalimantan selama kurun waktu 1999-2002 luas panennya secara konsisten terus mengalami penurunan. Gambaran yang sama juga dialami oleh Provinsi Jawa Barat, yang selama kurun waktu 2000-2002 juga mengalami penurunan.

Fenomena penurunan luas panen di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras nasional perlu diwaspadai. Sebab, sumber pertumbuhan produksi padi tahun 2002 di kedua provinsi itu berasal dari produktivitas yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim, yang akhir-akhir ini cenderung berfluktuasi dan sulit diprediksi.

Oleh karena itu, perlu upaya besar dari pemerintah untuk mengamankan produksi padi tahun 2002. Strategi pengamanan dalam jangka pendek dapat difokuskan pada monitoring dan evaluasi organisme pengganggu tanaman (OPT), kelancaran distribusi pupuk, dan sarana produksi pertanian lainnya.

◆◆◆

NAMUN, jika dilihat dari laju pertumbuhan produktivitas padi di tiga provinsi penghasil utama padi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur selama kurun waktu 1990-2002 terlihat adanya penurunan masing-masing sebesar 0,28, 0,16, dan 0,13 persen per tahunnya. Kondisi tersebut setidaknya menggambarkan bahwa produktivitas padi di Pulau Jawa, dengan teknologi yang ada saat ini, sudah dalam kondisi *leveling off*. Artinya, kondisi tanah di Pulau Jawa sudah menunjukkan "keletihan" (*soil fatigue*).

Penyebabnya menurut beberapa kajian karena frekuensi penggunaan lahan secara terus-menerus sepanjang tahun dan penggunaan bahan kimia (pupuk anorganik dan pestisida) yang berlebihan. Kiranya kondisi tersebut menyadarkan kita bahwa sumber pertumbuhan produksi padi pada masa datang tidak lagi di Pulau Jawa. Sebagai antisipasi, pemerintah perlu melakukan orientasi program pengalihan produksi padi dari Pulau Jawa ke luar Jawa secara konsisten dan berkelanjutan. Dukungan DPR tentang program tersebut sangat diperlukan.

Selain fakta di atas, perlu juga diperhatikan kondisi kependudukan dan ketersediaan sumber daya alam (khususnya air) yang ada di Pulau Jawa, mengingat sekitar 50 persen lebih produksi padi masih dihasilkan di Pulau Jawa. Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan, 59,2 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa sehingga kepadatan penduduknya juga semakin meningkat menjadi sekitar 946 jiwa per kilometer persegi. Gambaran itu kontradiktif jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya yang daratannya jauh lebih luas dari Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk masing-masing, 88,20 jiwa per kilometer persegi, 75 jiwa per kilometer persegi, dan lima jiwa per kilometer persegi.

Kembali ke Pulau Jawa, selama kurun waktu 1990-2000, kepadatan penduduk di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur meningkat tajam. Di Jawa Barat meningkat sebesar 908 jiwa per kilometer persegi pada tahun 1990 menjadi 1.009 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2000. Demikian pula di Jawa tengah dari 911 jiwa per kilometer persegi menjadi 948 jiwa per kilometer persegi, dan Jawa Timur 706 jiwa per kilometer persegi menjadi 720 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2000. Jumlah penduduk yang semakin banyak di Pulau Jawa itu tentu saja mendorong meningkatnya kompetisi penggunaan lahan. Peningkatan itu khususnya terjadi pada lahan pertanian untuk perumahan dan pembangunan prasarana publik, di samping untuk keperluan pembangunan sarana industri maupun sarana perhubungan, seperti untuk jalan raya.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Kondisi riil semakin bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Jawa harus diakui menjadi salah satu penyebab utama menurunnya luas baku lahan sawah di Pulau Jawa. Hasil empiris menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah tidak hanya menyebabkan menciutnya areal persawahan yang tersisa, tetapi juga menimbulkan dampak rambatannya. Dampak itu adalah terjadinya degradasi kualitas lahan sawah di sekitarnya, dan terjadinya percepatan laju alih fungsi lahan sawah tersebut secara keseluruhan. Diperkirakan laju konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian saat ini sekitar 50.000 hektar per tahun.

Di samping itu, jumlah penduduk yang semakin besar di pulau Jawa juga telah mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan yang begitu tinggi. Degradasi lingkungan akibat kompetisi penggunaan lahan yang berlebihan di Pulau Jawa sudah kita rasakan bersama. Salah satu dampak yang kini paling dirasakan adalah ketersediaan air di Pulau Jawa semakin terbatas. Hasil kajian yang dibuat tahun 2001 menunjukkan bahwa ada tiga daerah aliran sungai (DAS) yang diperkirakan telah mengalami defisit penggunaan air (kebutuhan lebih tinggi dari ketersediaan).

Ketiga DAS yang diduga defisit tersebut adalah DAS Cisadane-Ciliwung (3.406 vs 4.471 juta m^3/ th), DAS Citarum Hilir (6.619 vs 7.670 juta m^3/th) dan DAS Brantas Hilir (4.637 vs 4.788 juta m^3/th). Selain itu, kajian di atas juga menunjukkan bahwa dari 28 DAS yang ada di Pulau Jawa, tiga DAS sudah pada tingkat kekritisan yang sangat tinggi, delapan DAS tingkat kekritisannya tinggi, tiga DAS tingkat kekritisannya sedang, tujuh DAS tingkat kekritisannya rendah, dan hanya tiga DAS yang masih tergolong aman (belum kritis).

Ciri utama DAS krisis adalah kadar sedimen tinggi, perbedaan debit maksimum-minimum sangat tinggi, dan waktu aliran mencapai puncak banjir sangat cepat. Sebaliknya ketika aliran banjir melemah, terjadi penyusutan dalam waktu yang juga sangat cepat. Kondisi krisis ketersediaan air saat ini sudah mulai dirasakan di daerah pantai utara (pantura) Jawa. Hal ini juga pernah diberitakan oleh harian ini pada 19 Juni 2002.

Melihat kondisi di atas, upaya peningkatan produksi padi di Pulau Jawa menjadi tidak mudah dilakukan. Tanaman padi merupakan salah satu jenis tanaman yang membutuhkan air sangat besar. Hasil penelitian yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa untuk menghasilkan satu kg padi dibutuhkan air sebanyak 1.900-5.000 liter air. Padahal, untuk jenis tanaman lain seperti kentang, gandum, dan jagung masing-masing hanya butuh 500-1.500, 900-2.000 dan 1.000-1.800 liter.

◆◆◆

OLEH sebab itu, untuk mendorong peningkatan produksi padi nasional, setidaknya perlu dilaksanakan tiga program besar secara konsisten. Sebab, jika tiga program besar yang dicanangkan oleh Badan Litbang Pertanian, 2002, upaya keras pemerintah untuk meningkatkan produksi padi jauh lebih realistis untuk dicapai. Program pertama adalah program peningkatan produktivitas dan stabilitas produksi padi melalui inovasi teknologi. Caranya adalah mengembangkan pengelolaan tanaman terpadu, *crops livestock system*, padi tipe baru, serta perwilayahan dan pergiliran varietas. Selain itu, juga harus dilakukan penyediaan prasarana, khususnya rehabilitasi jaringan irigasi, penataan sistem distribusi pupuk dan penyediaan benih bermutu di tingkat petani.

Pengembangan skema kredit model KUT dan pembiayaan mikropedesaan, revitalisasi kelompok tani dan P3A dan pengembangan sistem insentif, dengan mengefektifkan harga dasar pembelian pemerintah melalui penetapan tarif yang sepadan. Selain itu, perlunya implementasi pembelian gabah oleh Bulog dan pemda, serta sinkronisasi kebijakan beras untuk orang miskin dengan operasi pembelian gabah.

Kedua, mengupayakan terlaksananya program peningkatan luas panen melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dan pemanfaatan lahan tidur. Implementasi program tersebut dalam jangka pendek-menengah dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi. Namun dalam jangka panjang peningkatan luas panen melalui pembangunan areal persawahan yang baru tidak dapat dilakukan karena kebijakan itu hanya mungkin dilakukan di luar Jawa.

Ketiga, program pengurangan kehilangan hasil. Kenapa hal ini mendesak untuk dilakukan karena kajian yang ada kehilangan hasil pada kegiatan panen dan pascapanen hingga saat ini masih tetap tinggi, yaitu sekitar 20 persen. Hal ini semakin gawat karena di tengah tingkat kehilangan itu, rendemen beras menurun dari sekitar 65 persen menjadi 62 persen.

Menurut hasil penelitian yang ada, kehilangan hasil terbesar adalah pada kegiatan panen, yaitu sekitar 15 persen. Kenapa bisa sedemikian besar tingkat kehilangan itu? Hal ini bisa terjadi karena merupakan akibat dari sistem (kelembagaan) panen dan alat perontok gabah yang tidak efisien. Sistem panen "bawon bebas" (gropyokan) dengan perontokan secara "bantingan" (manual), sehingga menimbulkan kehilangan hasil terbesar.

Penurunan rendemen beras (dan juga kehilangan hasil) terutama disebabkan oleh kehilangan hasil pada tahap penggilingan gabah menjadi beras. Selain itu, penggunaan pupuk yang tidak berimbang pada tahap usaha tani. Mesin penggilingan padi *one pass* dan berumur tua yang jumlahnya masih banyak merupakan penyebab utama berkurangnya rendemen beras. Rendeman beras ini dapat ditingkatkan melalui program revitalisasi (renovasi) industri penggilingan padi dan massalisasi pemupukan berimbang usaha tani padi. Oleh sebab itu, inovasi kelembagaan dan teknologi panen merupakan opsi kebijakan yang masih berpeluang besar untuk menurunkan kehilangan hasil.

◆◆◆

UPAYA peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi, memang menjadi tugas utama Departemen Pertanian. Namun, untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dukungan semua pihak yang terkait, tidak semuanya hanya diserahkan kepada Departemen Pertanian. Jadi, harus ada dukungan dari instansi terkait, yang juga memegang peranan yang penting dalam upaya peningkatan produksi padi. Misalnya, untuk mencegah penurunan luas panen akibat konversi lahan sawah dan rusaknya jaringan irigasi, perlu dukungan penuh dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Dalam Negeri, dan pemda setempat.

Menyangkut soal jaminan tersedianya sarana produksi (khususnya pupuk) di tingkat petani dan terjaminnya insentif harga, perlu adanya dukungan penuh dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, Bulog dan tentu saja pemda setempat menjadi wajib adanya. Selain itu, dukungan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Lapan dan lembaga lain yang berkaitan dengan informasi iklim dan cuaca juga sangat diperlukan.

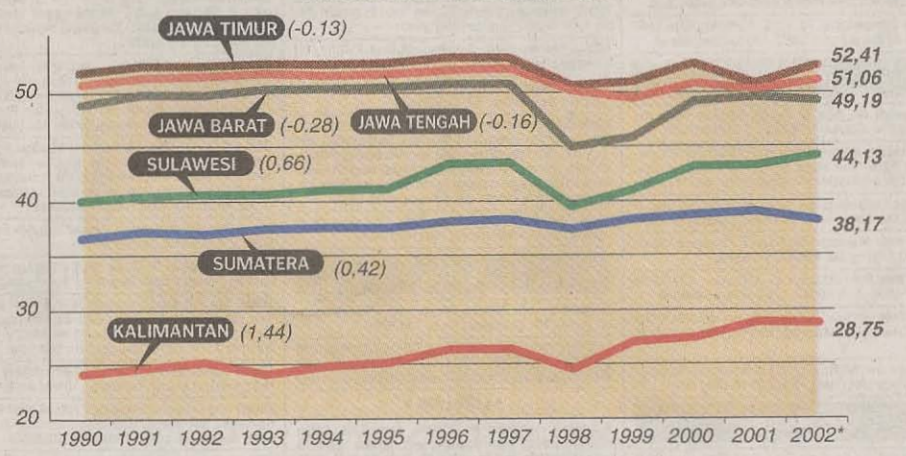
Namun, jika terjadi pemenggalan tugas dan tanggung jawab, tidak akan pernah membantu menyelesaikan masalah produksi pangan nasional,

khususnya beras. Jadi, butuh keharmonisan dan sinergisme dari semua pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah peningkatan produksi pangan. Apabila bisa diwujudkan, hal itu akan sangat membantu mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

◆ *Penulis adalah peneliti pada Puslitbang Sosek Pertanian, Bogor*

PRODUKTIVITAS PADI SAWAH DAN LADANG DI BEBERAPA PROVINSI

TAHUN 1990-2002 (KuGKG)



Keterangan: * Angka ramalan II.
Angka dalam kurung adalah persentase pertumbuhan.
Sumber: BPS

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 15 / APRIL / 2003
Hlm/Kolom : 31 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : KEHUTANAN / 634.9

Sindrom Akut Paru-paru Dunia

SAAT hendak berkunjung ke Sumatera Selatan (Sumsel), selain Sungai Musi, yang terbayang mungkin adalah hutan yang lebat. Saat hendak berjalan-jalan dengan naik kereta api lintas Sumatera dari Palembang ke Lampung, atau jalan-jalan melalui jalur lintas timur Sumatera, mungkin kita membayangkan akan ada pemandangan hutan begitu rapat di pinggir jalan.

MONYET-monyet bergelantungan di pohon, burung hinggap di dahan dan berkicau, kemudian terbang bergerombol ketika ada mobil yang melintas.

Jika itu yang dibayangkan, kita harus siap-siap kecewa karena hal itu sudah jarang ditemui.

Sepanjang perjalanan, tidak ada lagi pemandangan hutan yang utuh. Beberapa wilayah bahkan gundul, serta sebagian besar dihiasi pemandangan pohon karet dan sawit.

Dalam perjalanan dari Batu Raja ke kawasan pertanian di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), betapa menjemukan ketika melihat sebuah areal hutan telah berubah menjadi sebuah tanaman monokultur. Sepanjang mata memandang, hanya ada satu jenis pohon. Tidak ada lagi keanekaragaman hayati.

Hutan di Sumsel, sebagai salah satu paru-paru dunia, memang terus terdegradasi. Dari tahun ke tahun, luasnya semakin berkurang karena tingkat eksploitasi yang sangat tinggi.

Sebagai provinsi terluas kelima di Indonesia, Sumsel memiliki lahan hutan yang sangat luas. Data terakhir menyebutkan, provinsi ini memiliki 3,7 juta hektar lahan hutan.

Hutan di Sumsel terbagi menjadi berbagai fungsi hutan. Sebagian besar, sekitar 67 persen, telah berubah menjadi hutan produksi. Sementara 33 persen menjadi kawasan hutan suaka alam atau hutan lindung.

Akan tetapi, dari semua luas hutan, hanya tersisa 19 persen saja hutan yang masih benar-benar perawan atau hutan primer, baik hutan lindung maupun hutan konversi yang tidak lepas dari penjarahan.

Penjarahan dilakukan oleh berbagai pihak. Penjarahan secara besar-besaran sudah tentu dilakukan perusahaan swasta atau negara. Sementara yang kecil-kecilan dilakukan oleh masyarakat yang terdesak karena kebutuhan hidup.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Aidil Fitri, penjarahan yang terus berlangsung, ataupun penebangan liar *(illegal logging)*, disebabkan aparat penegak hukum lamban mengantisipasi adanya penjarahan hutan.

Selain itu, mereka juga terkesan tidak peduli dengan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penebangan liar. "Permasalahannya adalah tidak adanya penegakan hukum yang sungguh-sungguh terhadap kasus-kasus penjarahan hutan," kata Aidil.

Selain penjarahan, permasalahan hutan masih ditambah dengan kebakaran hutan, yang selalu muncul pada setiap musim kemarau.

Sebagian besar kebakaran tersebut disebabkan oleh kesengajaan. Hasil investigasi Walhi, 90 persen kebakaran hutan disebabkan ulah manusia.

Penjarahan hutan, terutama di kawasan hutan konservasi, juga diakui oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel Dulhadi. "Penjarahan hutan itu terus terjadi hingga sekarang," katanya.

Dulhadi menjelaskan, dari inventarisasi permasalahan hutan konservasi yang dilakukan oleh BKSDA, semua kawasan konservasi di Sumsel, yang terdiri atas satu calon taman nasional, enam kawasan suaka margasatwa, di antaranya mengalami penjarahan.

Luas kawasan konservasi di Sumsel sekitar 500.000 hektar. Salah satunya terdapat di Calon Taman Nasional (CTN) Sembilang, yang merupakan kawasan kaya berbagai jenis fauna.

Terletak di pesisir timur Sumsel, sebagian besar CTN Sembilang terdiri dari ekosistem hutan mangrove. Juga terdapat ekosistem hutan rawa air tawar dan ekosistem hutan rawa gambut. Di CTN Sembilang, terdapat 17 spesies mangrove atau 43 persen dari spesies mangrove yang ada di Indonesia. Hutan ini juga menjadi jalur imigrasi burung migran.

Lebih dari 28 spesies burung migran dari Siberia, Rusia, transit di kawasan Sembilang sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia dan Selandia Baru. Fenomena ini bisa dilihat pada bulan September hingga April.

Hutan Sembilang juga menjadi habitat buaya senyulong yang sudah sangat langka. Dengan tetap berlangsungnya penjarahan hutan di kawasan konservasi, paru-paru dunia ini terancam rusak.

CTN Sembilang, menurut Dulhadi, merupakan jalur peredaran kayu ilegal di Sumsel. Di kawasan ini juga terjadi penebangan liar hutan bakau serta pencurian hasil hutan berupa pohon nipah dan nibung.

Sedangkan pada beberapa kawasan konservasi lain di Sumsel, seperti hutan suaka margasatwa Dangku, Bentayan, Padang Sugihan, Gumai Pasemah, Isau-isau Pasemah, dan Gunung Raya, mengalami permasalahan

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

yang sama seperti CTN Sembilang. Di kawasan- kawasan konservasi itu selalu terjadi penebangan liar.

Bahkan, di kawasan suaka margasatwa Gunung Raya seluas 50.950 hektar, sekitar 80 persen lahannya, atau seluas 40.760 hektar, telah berubah menjadi perkebunan kopi.

Di kawasan suaka margasatwa Dangku seluas 31.752 hektar, penyerobotan lahan dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan perusahaan pemegang HPH sejak tahun 1990. Penyerobotan lahan ini mencapai luas 6.314,405 hektar.

Hutan-hutan tersebut semakin terancam dengan beroperasinya pertambangan di kawasan konservasi. Di Dangku, ada lima sumur minyak yang masih aktif, sedangkan yang tidak aktif terdapat di dua lokasi.

Saat ini juga ada rencana dari sebuah perusahaan pertambangan untuk mengeksploitasi gas bumi dengan dampak cakupan lahan seluas 5.600 hektar. Sedangkan di Bentayan, ada sembilan sumur aktif, lima tidak aktif, dan enam masih dalam pengembangan.

Gawat! Itulah kondisi hutan di Sumsel saat ini. Seperti paru-paru yang terkena SARS (*severe acute respiratory syndrome*), "penyakit" yang diderita hutan pun belum ada obatnya. Hutan Sumsel telah menjadi paru-paru dunia yang terkena sindrom akut parah.

(B04)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 6 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 19 / 1-2
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 636-8 / PERTERNAKAN AYAM

2,8 Juta Ekor Ayam Mati akibat Virus "Marex"

BANDUNG, KOMPAS — Sedikitnya 2,8 juta ekor ayam broiler di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis mati karena terserang virus *Marex*. Akibatnya, kerugian yang diderita oleh para peternak mencapai Rp 19,6 milyar.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Pengusaha Ayam Nasional (PPAN) Jawa Barat (Jabar) Heri Darmawan, Rabu (5/6), mengatakan, virus yang menyerang kekebalan ayam itu mewabah sejak Januari hingga April 2002. Selain karena virus, penyebarannya dipercepat oleh hujan yang turun secara terus-menerus.

"Karena tidak tahu apa jenis penyakitnya, para peternak hanya bisa pasrah. Mereka hanya melihat ayam-ayamnya tidak nafsu makan, buta, dan kejang-kejang. Mereka mengira masalah tersebut muncul dari faktor pembibitan. Makanya, pada awal mewabahnya penyakit, peternak sempat mendatangi pabrik pembibitan," kata Heri.

Dari pabrik pembibitan itu, lanjut Heri, para petani diberi saran untuk mengurangi kepadatan kandang, lebih memperhatikan sanitasi kandang, dan memberikan vitamin tepat pada waktunya. Selain itu, mereka pun sempat memberikan sampel pada Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

"Karena penyakitnya tidak bisa dihilangkan secara total, kami mencoba mencegahnya dengan melakukan beberapa upaya. Hasilnya, penyebaran virus bisa dikurangi. Sebab, kalaupun ayam-ayam itu diberi vaksin, hasilnya tidak akan efektif," ujar Heri.

Selain lebih mengontrol sanitasi kandang dan pemberian vitamin tepat pada waktunya, usaha-usaha yang dilakukan para peternak adalah mengurangi kepadatan kandang, dari 10 ekor untuk luas setiap satu meter persegi menjadi delapan ekor. Selain itu, dilakukan pula pengistirahatan kandang selama 30 - 50 hari setelah masa panen.

"Bahkan, untuk kandang yang pernah dihuni oleh ayam-ayam yang terkena penyakit, kandangnya diistirahatkan selama dua bulan," kata Heri.

Hingga saat ini, Tasikmalaya dan Ciamis adalah produsen ayam broiler terbesar di Jabar. Setiap minggunya, dari dua kabupaten ini diproduksi sedikitnya 2 juta ekor ayam. (Mo)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 17 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 33 / 6-8
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : HURIANA, Mu'man
No_Klass/Subjek : 640 / KESEJAHTERAAN KELUARGA

Evaluasi "Unpaid Work"

BERBEDA dari pekerjaan berupah (*paid work*) yang memperoleh tempat dalam sistem moneter dan pasar kerja, pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak dan perawatan jangka-panjang terhadap orang lanjut usia yang umumnya dilaksanakan seorang ibu rumah tangga, selama ini belum pernah mendapat kompensasi dan tidak ada penghargaan dari pasar.

Jenis pekerjaan rumah tangga tersebut di negara-negara maju dikenal dengan sebutan *unpaid work*. Banyak alasan mengapa pekerjaan itu tidak diperhitungkan secara sosial maupun ekonomi. Salah satunya adalah karena pengasuhan anak dan perawatan orang tua secara tradisional merupakan bagian dari *tugas keluarga terutama ibu rumah* tangga dalam fungsinya mengasuh dan mendidik.

Sebenarnya, dilihat dari beban kerja menurut hasil survei Program Pembangunan Persemkatan Bangsa-Bangsa *(UNDP), total jam kerja perempuan di* hampir semua negara, termasuk di dalamnya pekerjaan tak berupah, lebih lama dari total jam kerja pria yang bekerja di sektor formal.

Bila jumlah jam kerja yang tidak dibayar yang dikerjakan pria tidak sampai seperempat dari total jam kerja mereka, maka untuk wanita dua pertiga dari jam kerja mereka ternyata tidak dibayar. Walaupun demikian, tidak pernah terdengar adanya protes dan keluhan dari kalangan ibu rumah tangga menuntut haknya atas beban sosial yang ditanggungnya, dan perhatian terhadap kerja tak berupah yang dilakukan perempuan wanita hingga kini masih belum ada.

Tidak adanya penghargaan dan penilaian terhadap kerja tidak berupah oleh perempuan berarti masyarakat masih menilai rendah terhadap apa yang dikerjakan wanita terutama dalam rumah tangga.

◆◆◆

DEWASA ini struktur keluarga Indonesia tengah menghadapi proses transformasi sosial dari keluarga batih menuju keluarga inti. Hal ini membawa konsekuensi melemahnya fungsi sosial keluarga terutama dalam pengasuhan anak dan perawatan terhadap lanjut usia.

Selama ini berdasarkan konsep tradisional, keluarga merupakan unit basis dalam masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pembesaran anak dan perawatan jangka panjang bagi orang lanjut usia. Keluarga memiliki fungsi dasar menjamin kelangsungan hidup manusia dengan cara mempertahankan dan melindungi kehidupan anggotanya.

Dengan memudarnya fungsi tradisional keluarga, perawatan dan perlindungan yang "aman" terhadap generasi penerus berkualitas tampaknya semakin mengkhawatirkan. Dalam waktu dekat, pekerjaan rumah tangga seperti pengasuhan anak dan perawatan orang lanjut usia yang secara tradisional dilaksanakan ibu rumah tangga, akan semakin tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Sementara itu, negara yang sebenarnya diharapkan masyarakat menyediakan berbagai model pusat pelayanan sosial bagi anak dan lanjut usia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, akhir-akhir ini semakin melepaskan fungsi strukturalnya disebabkan pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

◆◆◆

DALAM situasi seperti itu, kalangan intelektual perlu memprakarsai pengembangan wacana kerja tak berupah yang diperankan istri/ibu sehingga dapat menemukan suatu cara untuk mengukur dan mengevaluasi jenis pekerjaan ini dalam konteks sosial.

Penilaian dan evaluasi tersebut penting untuk memberikan nilai sosial dan ekonomi terhadap pekerjaan tak berupah, sehingga tanggung jawab sosial perawatan anak dan lanjut usia dapat terjamin eksistensinya. Sejauh ini, masyarakat memang telah mengakui eksistensi peran sosial istri/ibu dalam konteks fungsi sosial keluarga. akan tetapi pengakuan saja tidak karena yang lebih penting adalah memberikan apresiasi terhadap pekerjaan yang tidak dibayar itu sehingga kegunaan sosial dari jenis pekerjaan itu yang demikian besar dalam konteks ekonomi, dapat diwujudkan.

Penghargaan terhadap pekerjaan tak berupah karena keberhasilannya dalam mempertahankan fungsi sosial sebenarnya tidak bisa dinilai dengan materi, dan oleh karenanya tidak cukup dan tidak sesederhana seperti masyarakat memberikan penghargaan kepada pekerjaan berupah.

Namun demikian, dukungan sosial dan ekonomi tampaknya perlu disediakan sehingga laki-laki (suami/ayah) perempuan (istri/ibu) secara aktif berbagi beban, termasuk partisipasi suami/ayah dalam pengasuhan anak dan perawatan orang lanjut usia melalui pengurangan jam kerja di tempat kerja sektor formal.

Pemendekan jam kerja suami/ayah yang umumnya bekerja di sektor formal, tentu memerlukan intervensi pemerintah. Memberikan solusi kepada masyarakat untuk menjamin kelangsungan pengasuhan anak dan perawatan jangka panjang dengan cara menghargai peker-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....

jaan tak berupah sebenarnya merupakan salah satu pekerjaan penting Departemen Sosial.

Sekalipun demikian, hingga sekarang belum ada wacana dan diskusi di masyarakat tentang ukuran khusus untuk memberikan apresiasi bagi pekerjaan tak berupah. Oleh karena itu, tulisan tentang isu pekerjaan tak berupah ini merupakan langkah awal untuk mendorong pewacanaan dan membuka diskusi yang luas dan mendalam tentang salah satu solusi terhadap ancaman keterlantaran anak dan lanjut usia sebagai dampak dari transformasi sosial keluarga tradisional kepada keluarga modern.

Upaya terukur untuk memberikan apresiasi terhadap pekerjaan tak berupah seperti perawatan anggota keluarga untuk jangka panjang dalam masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk suatu sistem dukungan sosial maupun ekonomi.

Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan inisiatif untuk mengembangkan kebijakan publik yang mampu memotivasi masyarakat untuk menekuni pekerjaan rumah tangga di rumah, antara lain dengan:

1) Pemendekan jam kerja misalnya dari 40 jam per minggu menjadi 35 jam per minggu;

2) Memberikan insentif untuk kerja rumah tangga, yaitu memberikan tunjangan perawatan anak dan lanjut usia bagi keluarga yang memiliki anak kecil dan lanjut usia

3) Memberikan keringanan pajak bagi keluarga yang merawat anak dan lanjut usia di rumahnya.

Dengan adanya pemendekan jam kerja misalnya, memungkinkan suami dan istri dapat sama-sama melakukan pekerjaan rumah tangga seperti pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia di rumah. Dengan adanya pemberian keringanan pajak (penghasilan, dan lain-lain) memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan pembiayaan perawatan anak dan lanjut usia. Sementara itu, dengan adanya insentif untuk kerja rumah tangga dapat memberikan motivasi kepada keluarga yang memiliki anak yang masih menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan perhatian kepada perawatan anak.

Dengan adanya apresiasi seperti itu, maka fungsi keluarga tradisional terutama dalam perawatan anak dan lanjut usia akan kembali menguat, sehingga dapat menekan beban negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial.

MU'MAN NURYANA MSC PHD
Pemerhati masalah kesejahteraan sosial, dan research associate Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 5 / APRIL / 2003
Hlm/Kolom : 30 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / KD. CLASS : BISNIS PERHOTELAN / 680

Dampak SARS, Hunian Hotel di Batam Turun

BATAM, KOMPAS — Dampak dari merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah (*severe acute respiratory syndrome*/SARS) dari negeri jiran, Singapura, mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu hotel dari luar negeri maupun dalam negeri merosot sehingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10 persen.

Demikian Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden Hotel Budi Purnomo dan Pengusaha Novotel Hotel, Anas, ketika dihubungi *Kompas* di Batam, Jumat (4/4). "Meski hotel yang kami kelola tidak bergantung kepada tamu-tamu dari Singapura, tapi pengaruh kasus SARS ini berdampak juga pada penurunan hunian hotel," kata Anas yang juga Bendahara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam.

Menurut Anas, dari jumlah kamar yang tersedia di Novotel Hotel, 250 kamar, biasanya terisi sedikitnya 50 persen, kini berkurang menjadi 40 persen.

"Kami hanya bisa berharap musibah ini segera berlalu cepat. Sebab, jika keadaan ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin penurunan akan lebih parah," ujar Anas.

Kepala Kantor Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Batu Ampar Mulkan Lekat mengatakan, SARS memang sangat mempengaruhi kedatangan wisatawan asing ke Batam.

Sementara Wali Kota Batam Nyat Kadir telah mengumpulkan seluruh camat untuk segera mengantisipasi dampak SARS. Salah satu langkahnya, menempatkan seorang dokter dan paramedis di tiap pintu masuk pelabuhan.

Pontianak

Mengantisipasi penyebaran SARS, dua rumah sakit dan 22 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Pontianak, Kalimantan Barat, disiagakan untuk menangani penderita SARS. Sedangkan di Balikpapan, enam rumah sakit dan puskesmas juga disiagakan mengantisipasi penderita SARS yang datang lewat Bandara Sepinggan atau Pelabuhan Semayang, Balikpapan.

Wali Kota Pontianak Buchary Abdurrahman, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Oscar Primadi, Jumat, mengatakan, sampai saat ini belum ditemukan kasus SARS di Pontianak. Meski demikian, rumah sakit dan puskesmas disiagakan karena penyakit ini sangat cepat penularannya.

Di tempat terpisah, Gubernur Kalimantan Barat Ja'far Usman mengatakan, meski di Kalbar belum ditemukan kasus SARS, bukan berarti aparat dan masyarakat boleh merasa senang. Kewaspadaan harus tetap tinggi.

Makasar siaga I.

Sementara itu, Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar menetapkan status siaga I terhadap penyebaran SARS di Sulawesi Selatan. Penetapan status ini menurut Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar Taufik Tjahyadi adalah untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS lewat pelabuhan dan bandara di Sulawesi Selatan.

Sementara dari Bali dilaporkan, untuk mengantisipasi penyebaran SARS di Bali, Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ngurah Rai Tuban memerintahkan petugas Imigrasi di bandara tersebut untuk tidak mengizinkan penumpang dan awak pesawat yang dicurigai ataupun terdeteksi terinfeksi virus SARS masuk ke Bali.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Imigrasi berwenang mendeportasi mereka. Ini langkah konkret Imigrasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ngurah Rai I Gede Widiartha di Tuban, Jumat.

Dalam instruksi bernomor 012/Kakanim/2003 yang dikeluarkan Kamis lalu, petugas Imigrasi diharuskan mampu menjelaskan alasan penolakan yang mereka lakukan.

(SMN/FUL/THY/B02/COK/DHF/EVY)

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Sabtu / 15 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 10 / 1
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 657.45 / AUDITING

Ada Penyimpangan Dana Kompensasi Sosial

JAKARTA, KOMPAS — Hasil audit kinerja Program Dana Kompensasi Sosial (DKS) tahun 2000 dan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) tahun 2001 menunjukkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sejak dikeluarkannya program yang bertujuan menanggulangi dampak sosial ekonomi akibat pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tersebut, kerugian total mencapai Rp 6,2 milyar lebih pada tahun 2000-2001. Meskipun begitu, penyimpangan dana kompensasi hanya sebesar 0,5 persen dari anggaran program.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Yusuf Kalla dan Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ari Sulendro dalam jumpa pers tentang hasil audit pemanfaatan dana kompensasi subsidi BBM untuk tahun 2000 dan 2001 di Jakarta, Jumat (14/6). Hadir pada acara itu antara lain Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif, Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar, dan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar.

Pelaksanaan audit dilaksanakan BPKP di 160 kabupaten atau kota, yang berarti 46 persen dari 344 kabupaten atau kota. Tujuannya untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta untuk memberikan rekomendasi jika ditemui kelemahan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut.

Penyimpangan dana tersebut dilihat dari ketepatan sasaran serta jumlah dan waktu pelaksanaan program yang dilakukan departeman atau instansi terkait. Yang dimaksud dengan tepat sasaran adalah bahwa dana bantuan itu diterima atau tidak oleh keluarga miskin berpenghasilan rendah yang membutuhkan. Selain itu, bantuan yang diberikan harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, dan penyalurannya tepat waktu.

Dijelaskan Ari, jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi tahun 2001 mencapai Rp 2,197 trilyun dan direalisasikan Rp 2,001 trilyun. Indikasi penyimpangan pada program tahun itu adalah Rp 5,8 milyar, sedangkan Dana Kompensasi Sosial tahun 2000 sebesar Rp 806,9 milyar dan realisasi sebesar Rp 806,4 milyar sehingga besarnya penyimpangan ada-l: Rp 424 juta.

"Dari hasil audit kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program selama dua tahun itu berhasil memfasilitasi penyaluran dana kompensasi sosial untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan," kata Ari.

Syamsul mengemukakan, untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan penyaluran dana kompensasi subsidi BBM tahun ini, serta mempercepat pelaksanaan hasil audit berikutnya, maka secara periodik telah diadakan rapat koordinasi evaluasi dan pemantauan pelaksanaan penyaluran dana kompensasi subsidi BBM yang dikoordinasikan melalui Menko Kesra dan Menko Perekonomian dengan melibatkan BPKP sejak awal. "Maksudnya agar pengelolaan atau pemanfaatan dana kompensasi subsidi BBM tidak salah arah," ujar Syamsul. (YUN)

